

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN PADA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Monika Yuliani

NIM: 210716058

Pembimbing:

Ika Susilwati, S.E., M.M

NIP. 197906142009012005

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

2020

ABSTRAK

Yuliani, Monika. *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Miskin Pada keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ika Susilawati, S.E., M.M.

kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan merupakan alat ukur untuk melihat tingkat kemiskinan disuatu negara. Pada tahun 2007 pemerintah telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM). Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), bagaimana efektivitas integrasi dalam pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana efektivitas adaptasi dalam pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis data secara induktif.

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan, efektivitas pengelolaan PKH yang diukur dengan menggunakan ukuran efektivitas diantaranya yaitu: pencapaian, integrasi, dan adaptasi. Hanya ukuran adaptasi yang sudah efektif. Sedangkan pencapaian dan integrasi masih belum efektif. Pada ukuran pencapaian dikatakan masih belum tercapai karena target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran dan proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Dan pada ukuran integrasi dikatakan belum efektif karena belum adanya penyampaian mengenai keterampilan untuk anggota PKH didalam sosialisasi dengan pendamping PKH. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, menurut 4 prinsip dalam manajemen Islam yaitu: prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan, prinsip tidak boros, dan prinsip berlaku adil. Berdasarkan data lapangan, yang sudah terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kemanfaatan. Sedangkan Prinsip tidak boros belum terpenuhi karena penerima bantuan sosial Program Keluarga Sosial (PKH) tidak menggunakan dana bantuan yang didapat dari PKH, selain untuk membeli kebutuhan komponen, penerima PKH menggunakan dana tersebut untuk membeli barang diluar komponen. Dan Prinsip berlaku adil belum terpenuhi karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


No	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1	Monika Yuliani	210716058	Ekonomi Syariah	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 24 April 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Han Rendi, M.Ag
NIP. 197507162005012004

Menyetujui,

Ika Susilawati, SE., M.M.
NIP. 197906142009012005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di Ponorogo
Nama : Monika Yuliani
NIM : 210716058
JURUSAN : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I
NIP. 197506022002121003
Penguji I :
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Si.
NIP. 197202111999032003
Penguji II :
Ika Susilwati, S.E., M.M
NIP. 197906142009012005

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 24 April 2020

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

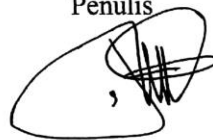
Nama : Monika Yuliani
NIM : 210716058
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada
Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2020

Penulis



Monika Yuliani
NIM: 210716058

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Monika Yuliani
NIM : 210716058
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 15 Mei 2020

Pembuat Pernyataan,



Monika Yuliani

NIM: 210716058



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat diantaranya dengan melakukan pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam rencana jangka menengah nasional, meliputi lima sasaran pokok, yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur. Implementasinya, yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.¹

Implementasi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengurangan tingkat kemiskinan yang pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Garis kemiskinan menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dimana dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, posisi dimana manusia berada dalam lingkungan sekitar.

¹ Zainollah dan Farid Wahyudi, Analisis Efektivitas Kebijakan Program Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol.3, No.2, (2018), 165.

Indonesia merupakan termasuk negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan menjadi judul khusus pada Bab IV yang didalamnya terdapat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial.² Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.³ Ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan.⁴ Namun demikian, saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belum tercapai dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh pendiri bangsa ini.

Kesejahteraan dipersepsikan sebagai suatu pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sudah banyak negara yang berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan per kapita.⁵ Namun demikian, keberhasilan ini hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok elit nasional.

Kondisi sejahtera terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta memperoleh perlindungan dari risiko-risiko yang mengancam kehidupannya. Ilmu ekonomi kesejahteraan adalah salah satu cabang ekonomi yang normatif. Ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan ekonomi bisa berjalan secara optimal dan juga akan memikirkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 2.

³ Sigit Budhi Prakoso, Efektivitas Pelayanan Kesehatan BPJS di Kecamatan Batang, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.4, No.1, (2015), 75.

⁴ Agung Eko Purwana, Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, (2014), 22.

⁵ *Ibid.*, 23.

Seiring dengan perkembangan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncul kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian menurut syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Meskipun belum semua meyakini akan tercapainya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta yaitu langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya.

Realitanya dalam kehidupan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. Pada kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, dimana yang memiliki perekonomian lebih menolong yang memiliki perekonomian kurang mampu sehingga kesenjangan akan berkurang walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian hanya tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya.⁶

Islam memandang bahwa kemiskinan juga dipandang sebagai suatu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan selalu taat dalam beribadah.

Ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang perlu ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan

⁶ Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 24.

potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka mereka termasuk golongan pendusta agama (QS. Al-Ma'un: 1-3).

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) فَذُكِّرْ لَكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ

الْمَسْكِينِ (3)

Artinya :

(1) Tahukah kamu (Orang) yang mendustakan agama? (2) maka itulah orang yang menghardik anak yatim (3) dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Permasalahan mendasar yang sampai sekarang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan yang ditandai banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indonesia sendiri telah melakukan program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah, individu maupun masyarakat. Seperti program pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin telah dilaksanakan dalam program-program nasional sejak akhir tahun 60-an. Prioritas utama pemerintah ditujukan kepada pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai program anti kemiskinan telah diciptakan, mulai dari program bantuan pemberian modal kerja bagi kelompok miskin sampai dengan transmigrasi yang bertujuan memberikan lahan bagi mereka yang tidak memiliki lahan. Kemudian dilakukan pemerataan pembangunan antar daerah dengan menciptakan berbagai program yang menyediakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar upaya pemberian pelayanan dasar bagi kelompok yang tidak mampu di daerah pedesaan. Melalui program ini telah dibangun ribuan sekolah dan puskesmas yang ada saat ini telah melayani kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi jutaan rakyat di Indonesia.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal di negara lain dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) atau bantuan langsung tunai bersyarat.⁷ Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi selama ini.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin diberikan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya dibidang kesehatan, dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP).

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
2014	865,81	99,86
2015	867,39	103,22
2016	868,81	102,06

⁷ <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> (diakses pada tanggal 7 Februari 2020, jam 21.09).

2017	869,89	99,03
2018	870,70	90,22

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (data diolah)⁸

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk di kabupaten Ponorogo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi berbeda dengan jumlah penduduk miskin di Ponorogo yang cenderung mengalami penurunan, meskipun di tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 3,36 persen. Kenaikan jumlah penduduk tersebut dikarenakan naiknya harga barang kebutuhan pokok dan naiknya harga BBM. Kemudian di tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlah kemiskinan mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan upaya pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan. Adanya RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka dapat ditentukan program-program pemerintah untuk penduduk miskin. RTS didapat dari hasil sensus BPS sedangkan jumlah penduduk miskin didapat dari survey sosial ekonomi nasional untuk evaluasi program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan. Dari data RTS yang diperoleh akan digunakan untuk program bantuan sosial, diantaranya yaitu adanya bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).⁹

Saat ini jumlah penduduk di Ponorogo meningkat, kemudian diikuti oleh tingkat kemiskinan yang menurun. Hal tersebut didukung oleh program bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan. Bantuan sosial tersebut salah satunya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dimana penerima PKH masuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Dinas Sosial, jumlah

⁸ Badan Pusat Statistik Ponorogo dalam "https://ponorogokab.bps.go.id (diakses pada tanggal 16 Februari 2020, jam 12.40).

⁹ Redaksi Teras Jatim, "Tingkat Kemiskinan di Ponorogo Menurun" Dalam <https://www.terasjatim.com/tingkat-kemiskinan-di-ponorogo-menurun/> (diakses pada tanggal 8 Februari 2020, jam 18.05).

KPM penerima PKH di Ponorogo mencapai 45.372 jiwa.¹⁰ Sementara di setiap kecamatan terdapat pendamping PKH yang berperan untuk mendampingi peserta penerima PKH. Pendamping PKH di kabupaten Ponorogo sejumlah 131 orang, dan dalam satu kecamatan Ponorogo terdapat 4 pendamping, kecuali untuk kecamatan Ngrayun terdapat 23 pendamping karena penerima keluarga manfaat PKH ada di kecamatan Ngrayun.¹¹ Meskipun program keluarga harapan setiap tahunnya mengalami graduasi yang berarti penerima PKH sudah keluar dari garis kemiskinan dan mandiri secara ekonomi, bukan berarti pengelolaan PKH sudah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Siman, Kabupaten Ponorogo, Bantuan yang didapat dari PKH bisa berupa uang ataupun barang. Bantuan berupa barang seperti beras 10 kg dan telur 1 kg, serta bantuan berupa uang tunai sejumlah 200 ribu setiap bulannya. Pengelolaan uang dari PKH tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti keperluan sekolah. Namun, tidak hanya digunakan untuk membeli keperluan sekolah saja melainkan digunakan untuk membeli barang diluar kebutuhan utama seperti untuk membeli pulsa.¹² Selanjutnya dengan keluarga penerima PKH di Kelurahan Siman yang memiliki empat orang anak yang masih duduk dibangku sekolah. Keluarga tersebut mendapat bantuan PKH berupa beras 10 kg, telur 1 kg dan uang 500 ribu setiap bulannya. Pemberian bantuan berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah anak serta tidak hanya digunakan untuk membeli keperluan sekolah anak melainkan digunakan untuk membayar listrik dan membeli barang diluar kebutuhan sekolah.¹³ Berkaitan dengan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

¹⁰ Kominfo Ponorogo, "52 Keluarga Miskin Lulus Dari Status KPM PKH" Dalam <https://ponorogo.go.id/2019/05/16/52-keluarga-miskin-lulus-dari-status-kpm-pkh/> (diakses pada tanggal 8 Februari 2020, jam 20.59).

¹¹ Gesang, *Wawancara*, Ponorogo, 10 Februari, 2020.

¹² Ibu Rokhana, *Wawancara*, Ponorogo, 17 Februari 2020.

¹³ Ibu Dwi, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2020.

tentang bagaimana efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan bantuan berupa uang merupakan aspek yang menarik untuk diteliti, karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk nyata bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa digunakan untuk membantu membeli kebutuhan setiap harinya atau melakukan proses transaksi jual beli .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pencapaian tujuan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas integrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana efektivitas adaptasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pencapaian tujuan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas integrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas adaptasi dalam pengelolaan Program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah untuk perkembangan khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, bisa menjadi bahan referensi selanjutnya khususnya terkait dengan pengelolaan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Ponorogo yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Dinas Sosial

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Secara garis besar, dalam pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Penelitian ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Penelitian ini penulis akan menguraikan tentang telaah penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian

Penulis akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV Data dan Analisis Data

Pada bab IV ini akan membahas mengenai data yang berisi gambaran umum Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari letak geografis, kondisi monografi, dan kondisi sosial ekonomi, serta kondisi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo. Analisis data dari penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisisnya meliputi efektivitas pencapaian tujuan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan dan pengaruhnya di Kabupaten Ponorogo, efektivitas integrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ponorogo, dan efektivitas adaptasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo.

BAB VI Penutup

Penelitian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Pengelolaan Program PKH

1. Konsep Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁴ Pengertian efektivitas tersebut sama dikatakan menurut Sondang P. Siagin yang mendefinisikan efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan, artinya jika hasil kegiatan semakin mendekati target, berarti semakin tinggi efektivitasnya.¹⁵

Menurut Aam Komariyah Cepi Triatna, mendefinisikan efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai.¹⁶ Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Carpenter, mengemukakan prinsip umum menilai efektivitas sebagai berikut:¹⁷

¹⁴ Lukas Klemes, Syahrani, Fajar Apriani, Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat, *e-journal Administrasi Negara*, Vol.7, No.1, 2019, h.8582.

¹⁵ Nora Eka Putri, Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang, *Tingkap*, Vol. 10, No.2, 2014, h.178.

¹⁶ Supardi, *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.

¹⁷ Made Pidarta, *Landasan Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 258.

- a. Menilai efektivitas adalah berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses input untuk menjadi output. Tujuan atau output harus tepat dengan kriteria.
- b. Sistem yang dibandingkan harus sama, kecuali alat pemrosesnya. Misalnya yang harus sama atau homogen adalah tingkat pendidikan, kemampuan anak, sosial ekonomi, dan sebagainya.
- c. Mempertimbangkan semua output utama.
- d. Korelasi diharapkan bersifat kausalitas. Yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus kausalitas.

2. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers mengatakan mengenai Ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan

¹⁸Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: PPM Erlangga, 1985), 53.

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Dan dari integrasi berkaitan dengan perkembangan yang merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Dalam organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya.¹⁹ Oleh karena itu di dalam integrasi akan membawa proses perkembangan suatu individu ataupun organisasi yang akan memberikan efek didalam keberlangsungan hidupnya ataupun didalam organisasi tersebut.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kemampuan adaptasi dalam sebuah organisasi merupakan sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan baik dari sisi Intern dan ekstern yang ada, kemudian dari adanya perubahan tersebut akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan.²⁰

Menurut Budiani, menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program tepat dengan sasaran dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:²¹

1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi program

¹⁹ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 107.

²⁰ Ibid., 107.

²¹ Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol.2, No. 1, 53-54.

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai mereka tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Tujuan program

Adanya tujuan program merupakan ukuran sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pemantauan program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Untuk mengukur efektivitas program, menurut Sutrisno ukuran efektivitas program dalam sebuah organisasi yaitu:

- 1) Pemahaman program, dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
- 2) Tepat sasaran, dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
- 3) Tepat waktu, dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Tercapainya tujuan, diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
- 5) Perubahan nyata, diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak

tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak tepat sasaran dengan yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

3. Efektivitas dalam Perspektif Islam

Menurut manajemen Islam, dengan menggunakan prinsip untuk mengatur hidupnya agar efektif adalah sebagai berikut:²²

- a. Prinsip keseimbangan, maksudnya dalam menjalankan suatu kegiatan seorang muslim harus berbuat baik, bertindak yang harmonis, pantas dan wajar dan tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir dan pelit
- b. Prinsip mencapai kemanfaatan, maksudnya seorang muslim dalam menjalankan kegiatannya harus bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungan dan agamanya.
- c. Prinsip tidak boros, yang dimaksud disini adalah setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya dalam menggunakan harta, waktu, dan tenaga tidak digunakan secara boros. Jika dilihat dari sudut ekonomi sifat boros termasuk biaya sehingga dalam penggunaan biaya menjadi beban dalam manajemen
- d. Prinsip berlaku adil, artinya seorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien haruslah berlaku adil terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan adil dalam semua perbuatannya.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program tersebut merupakan program pemberian yang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.²³ Sejak tahun 2007 pemerintah

²² Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pengantar Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), 153-158.

²³ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2015, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 5.

Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.²⁴

2. Tujuan PKH

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGS). Tujuan lain dari PKH secara khusus maupun secara umum. Berikut tujuan khusus PKH, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM

²⁴ Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, *Prosiding: Riset & PKM*, Vol. 4, No.1, 90.

Tujuan umum PKH, yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

3. Dasar Hukum PKH

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- f. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- g. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
- h. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
- i. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri)

4. Penerima PKH

PKH diberikan kepada Keluarga Sehat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a) Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
- b) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)

- c) Anak SLTP/MTS/Paket B/SMLB (usia 112-15)
- d) Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

5. **Komponen Bantuan dan Jangka Waktu Kebersertaan PKH**

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen-komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Bantuan Tetap untuk setiap keluarga**
 - 1) Reguler : Rp. 550.000,- /keluarga/tahun
 - 2) PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- /keluarga/tahun
- b. **Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH**
 - 1) Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
 - 2) Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
 - 3) SD : Rp. 900.000,-
 - 4) SMP : Rp. 1.500.000,-
 - 5) SMA : Rp. 2.000.000,-
 - 6) Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000,-
 - 7) Lanjut Usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.²⁵ Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar

²⁵ Program Keluarga Harapan, <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, (diakses pada tanggal 12 Februari 2020, jam 20.28)

secara alamiah. Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan metode tertentu.²⁶

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah kondisi ideal yang hendak dicapai manusia yang bersifat fisik dan spiritual secara utuh dan terpadu. Menurut kata “kesejahteraan” mengandung makna “kemakmuran” yang berarti kondisi pada setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Kesejahteraan mengandung dua makna yaitu kesejahteraan fisik dan kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan fisik merupakan pencapaian dari kesejahteraan ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi, seperti makan, minum, sandang dan papan. Kesejahteraan spiritual yaitu ketenangan, kedamaian, dan ketentraman batin.²⁷

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara material dan sosial. Kesejahteraan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera.

²⁶ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2015, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 11.

²⁷ Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), 78.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, meliputi:

a) Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan lingkungan.

b) Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu konsep perhitungan kesejahteraan adalah diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan antara lain sebagai berikut:

a) Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m².
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bamboo, atau kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal mereka terbuat dari bamboo, rumbia, atau yang berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tetapi bersama-sama dengan rumah tangga lain.

- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi seperti sungai atau hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan dan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang berharga lainnya.²⁸

b) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga.

- 1) Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- 2) Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;

²⁸ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 44-45.

- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
 - c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
 - d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
 - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
 - f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sd 6) dan indikator berikut:
- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur;
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun
 - d. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah;
 - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
 - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
 - g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin;
 - h. Pasangan usia subur dengan anak dua tahun atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 sd 14) dan indikator berikut:
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;

- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
 - c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
 - d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
 - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 sd 19) dan indikator berikut:
- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
 - b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.
3. Pengertian Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan menurut islam mempunyai konsep yang mendalam.²⁹

Menurut al-Qur'an, kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan masalah ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara tersebut

²⁹ Diah Mukminatul Hasimi, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, (2020), 66.

menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.³⁰ Berikut ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan Qs. Al-Nahl: 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ أَؤْتِيهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya :

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal.

Kesejahteraan juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 10

وَأَلْقَدَمَكُنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠)

Artinya:

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

Pada ayat di atas, Allah mengingatkan kepada hambaNya, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan berupa bumi yang diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat untuk memenuhi segala tujuan hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, segala jenis binatang, dan tambang-tambangNya yang semua itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah.

³⁰ Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, *Maqdis(Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Vol.1, No.1, 74.

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan akumulasi dari kondisi yang baik, lahir dan batin, maka agama Islam diturunkan Allah untuk mengarahkan manusia pada kesejahteraan yang hakiki. Untuk mencapai kesejahteraan hakiki tersebut, agama Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan atau profesinya dan bersungguh-sungguh serta khusyuk dalam menunaikan ibadah.

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَإِعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا (راوه ابن عساکر)

Artinya :

“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari.” (HR. Ibnu ‘Asakir).

Bekerja untuk dunia adalah bekerja dalam berbagai segi kehidupan *muamalah*, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya, sedangkan bekerja untuk akhirat adalah kegiatan ritual atau ibadah *mahdah*, seperti shalat, puasa, dan sebagainya.

Agama islam mendorong umatnya untuk bekerja sungguh-sungguh mencari kehidupan yang baik untuk kesejahteraan hidup di dunia. Bahkan berjuang, dalam memenuhi kebutuhan hidup disejajarkan dengan perjuangan membela agama.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا..... (القصص: 77)

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi....” (Q.S. Al-Qashash:77)

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling

bersaing dan bertentangan. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:³¹

a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu nilai dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban digunakan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemashlahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

c. *Takafful* (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

D. Kajian Pustaka

Pertama Skripsi Ridho Diana, dengan judul skripsi “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dengan hasil penelitiannya yaitu efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jawa masuk dalam kategori tidak baik, dengan skor 1.080 atau 33% dari skor ideal yang diharapkan 2520. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takafful*, dalam implementasinya PKH hanya terlibat dari tanggung jawab yang sudah efektif. Terlihat dari pemahaman tentang keaktifan dalam setiap pertemuan. Sedangkan nilai keadilan dan *takafful* belum efektif. Hal ini dikarenakan

³¹ Ibid.

masih banyak penggunaan dan untuk kebutuhan pokok konsumsi pada saat pencairan dana tersebut.³²

Kedua, skripsi Eny Kusumawati dengan judul skripsi “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”, dengan hasil dari penelitian ini yaitu implementasi PKH yang diukur melalui indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Seluruh indikator tersebut terpenuhi. Namun PKH desa Soko dan terbatasnya kuota dari pemerintah untuk Desa Soko. Dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takafful*, dalam implementasinya PKH sudah diterapkan secara bertanggung jawab dan sebagai sistem jaminan sosial untuk masyarakat. Namun prinsip keadilan belum terpenuhi, karena PKH belum merata untuk masyarakat Desa Soko.³³

Ketiga, skripsi Jheniar Evriliany Akmel dengan judul skripsi “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, dengan hasil penelitian yaitu kebijakan pendistribusian raskin berhasil apabila 6 indikator kebijakan penentu program raskin dapat terpenuhi dengan baik dan itu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pendistribusian beras miskin di lapangan terdapat 4 indikator yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga dan tepat waktu. Program raskin di Kecamatan Sukarame hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin. Implementasi program raskin di Kecamatan dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar *takafful* yaitu suatu

³² Ridho Diana, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Inten Lampung, 2018).

³³ Eny Kusumawati, “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga.³⁴

Keempat, skripsi Khairul Anwar Saputra Nst dengan judul skripsi “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota”, dengan hasil penelitian yaitu walaupun implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya ketidak transparan dalam pemilihan penerima bantuan dengan masyarakat, masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan rumah layak huni dan kurang tepatnya waktu dalam pembangunan rumah bantuan layak huni.³⁵

Kelima, skripsi Asti Prichatin dengan judul skripsi “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan keluarga (studi kasus pada PKH Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”, dengan hasil penelitiannya adalah hasil efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran, pemahaman tujuan program, adanya sosialisasi, dan pemantauan program menunjukkan bahwa PKH di Desa Kasegeran sudah berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa perubahan indikator keseluruhan. Jika dilihat dari perspektif Islam yakni jaminan sosila sebagai bentuk tanggung jawab negara, konsep kerja keras, dan tidak bergantung diri kepada orang lain. Belum sepenuhnya tercapai, hal ini karena masih terdapat KPM yang merasa

³⁴ Jheniar Evriliany Akmel, “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Inten Lampung, 2018).

³⁵ Khairul Anwar Saputra, “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota”, Skripsi (Sumatera : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019).

keberatan apabila bantuan dari pemerintah dihentikan, serta menunggununggu waktu pencairan dana bantuan sosial PKH.³⁶.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridho Diana (2018)	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	a. Variabel Penelitian efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). b. Menggunakan metode penelitian kualitatif	a. Penelitian yang dibahas: Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam b. Lokasi penelitian: Kabupaten Ponorogo
2.	Eny Kusumawati (2019)	Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)	a. Metode penelitian: kualitatif b. Membahas tentang: peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam	a. Penelitian yang dibahas: pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) b. Lokasi penelitian: Kabupaten Ponorogo

³⁶ Asti Prichatin, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

3.	Jheniar Evriliany Akmel (2018)	Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)	a. Menggunakan Teori : - Efektivitas - kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam b. Metode penelitian: <i>field research</i> (penelitian lapangan), kualitatif deskriptif.	a. Lokasi Penelitian: Kabupaten Ponorogo b. Fokus pembahasan: penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
4.	Khairul Anwar Saputra Nst (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota	a. Variabel yang diteliti: efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) b. Metode penelitian: kualitatif deskriptif	a. Penelitian yang dibahas: peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam b. Lokasi penelitian: Kabupaten Ponorogo
5.	Asti Prichatin (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan keluarga (studi kasus pada PKH Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	a. Variabel yang diteliti: efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) b. Metode penelitian: kualitatif deskriptif	a. Penelitian yang dibahas: peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. b. Lokasi Penelitian: Kabupaten Ponorogo



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif.³⁷ Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada lokasi di Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan demografi kependudukan yang berhak menerima bantuan PKH.

Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁸ Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara keseluruhan. Sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

5.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

yang sedang diteliti.³⁹ Studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas dalam pengelolaan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Dalam penentuan lokasi penelitian perlu untuk mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti kualitatif.⁴⁰ Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Ponorogo dan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi di kabupaten Ponorogo karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah dilihat dari segi waktu dan tenaga. Peneliti juga tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Alasan lain yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut adalah fenomena masalah terkait efektivitas pengelolaan bantuan sosial pada penerima Program Keluarga Sosial (PKH) yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi/keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁴¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk bukan bilangan atau angka tetapi data yang berupa kata. Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data tentang proses pengelolaan bantuan pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

³⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 24.

⁴⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)24.

⁴¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 72.

- b. Data jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Data tentang pengelolaan Program keluarga Harapan (PKH)

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.⁴² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber⁴³. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta obeservasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu diantaranya:

- a. Peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Kordinator Daerah Program Keluarga Harapan (PKH) Ponorogo

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau di peroleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa publikasi perusahaan, laporan pemerintah, buku sebagai teori, studi dokumentasi atau dari penelitian terdahulu.⁴⁴ Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

- a. Observasi

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁴³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 89.

⁴⁴ Ibid.

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁵ Hal ini, observer melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di daerah Ponorogo yang masuk kedalam daerah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengamati pengelolaan penerimaan bantuan untuk peserta PKH guna untuk melihat seberapa efektif pengelolaan bantuan Program keluarga Harapan (PKH).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo dan pihak dari Dinas Sosial Ponorogo. Agar wawancara menjadi lebih valid, peneliti merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁴⁷ Dalam wawancara terstruktur dilakukan secara individual yakni wawancara peneliti dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo, kemudian dengan pendamping dan kordinator daerah Program Keluarga Harapan (PKH) di Ponorogo.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Fungsi dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang meliputi letak geografis, struktur perangkat kabupaten, buku-buku, arsip dan pendukung dokumen lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Pada suatu penelitian terdapat teknik analisa data menggunakan cara induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini teknik analisa data dengan menggunakan cara induktif. Induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penelitian kualitatif mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, kemudian disusun berdasarkan sumber-sumber khusus yang terdapat dilapangan. Semua data yang dikumpulkan selama di lapangan secara bertahap dan sejak awal dianalisis, kemudian dikembangkan lalu dimaknai secara khusus, diklarifikasikan kelompok demi kelompok kemudian dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan dan teori. Teknik analisa data dengan menggunakan cara induktif merupakan analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

⁴⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 54.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰ Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh secara reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil penjabaran dan pemilihan data sesuai dengan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya jika diperlukan.⁵¹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya yaitu berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Menurut Miles dan Huberman, menyatakan bahwa dalam penyajian data, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵²

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

⁵⁰ Ibid., 244.

⁵¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 34.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.⁵³ Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan yang harus memenuhi; mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Terdapat teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan teknik pemeriksaan melalui 1) perpanjangan pengamatan, 2) meningkatkan ketekunan, 3) triangulasi, 4) analisis kasus negatif, 5) menggunakan bahan referensi, 6) mengadakan membercheck.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan yaitu:

a. Meningkatkan Ketekunan

Ketekunan pengamatan yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan “seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan”⁵⁵. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.

⁵³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 34.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 270.

⁵⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, 92.

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah ditemukan, selain itu itu peneliti dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁵⁶ Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

c. Menggunakan bahan refrensi

Refrensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini alat-alat bantu yang digunakan penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga lebih dapat dipercaya.⁵⁷

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁵⁷ *Ibid.*, 330.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. DATA

1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

a. Kondisi Geografi

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada $111^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}49'$ hingga $8^{\circ}20'$ Lintang Selatan. Wilayah kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan kabupaten Magetan, kabupaten Madiun dan kabupaten Nganjuk di sebelah Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pacitan dan kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).⁵⁸

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 Km² dengan ketinggian antara 92 samapai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu dataran tinggi, meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 syngai dengan panjang antara 4-58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun holtikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area lahan sawah sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang menjadi 281 desa dan 26 kelurahan.

b. Kondisi Iklim dan Topografis

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019*, (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2019), 3.

Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s/d 31° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayah terluas (di atas 100 Km²) secara berturut-turut adalah kecamatan Ngrayun, Pulung dan Sawoo.

c. Kondisi Demografis Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, maka didapatkan data sebagai berikut:

1) Komposisi penduduk berdasarkan kelamin

Data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo menurut BPS yaitu sebesar 870.705 jiwa. Kecamatan Ponorogo tercatat mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 77.888 jiwa, diikuti kecamatan Babadan 66.877 jiwa dan kecamatan Ngrayun sebanyak 56.683 jiwa. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mencapai 634 jiwa per Km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ponorogo yaitu 3.476 jiwa per Km² dan terendah di Kecamatan Pudak yaitu 195 jiwa per Km². Menurut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	435.169
Perempuan	435.536
Jumlah	870.705

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2019 (data diolah)

2) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo dipengaruhi dengan adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Untuk melihat Komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Komposisi Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Total
Tamat SD/Sederajat	227.758
Tamat SMP/Sederajat	117.829
Tamat SMA/Sederajat	64.722
Tamat SMK/Sederajat	52.692
Tamat DI/II/III/Akademi	9.695
Tamat S1/Sederajat	32.554
Jumlah	505.250

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2019 (data diolah)

3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2018 tercatat 5.917 orang, yang terdiri dari laki-laki 2.433 orang dan perempuan 3.484 orang. Jumlah angkata kerja yang bekerja sebesar 5.719 orang, sedangkan sisanya 198 orang bukan angkatan kerja seperti sekolah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Untuk melihat komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pekerjaan	Total
Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	305
Industri Pengolahan	941
Listrik, Gas, dan Air	153
Bangunan	132
Perdagangan besar, Perdagangan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	7

Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4
Keuangan dan Asuransi	676
Kegiatan Lainnya	3.501
Jumlah	5.719

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2019 (data diolah)

4) Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat

Sarana dan prasarana merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam masyarakat akan membantu masyarakat untuk mendukung semua aktivitas yang dilakukan. Adanya sarana dan prasarana pokok seperti sarana pendidikan, sarana peribadatan, dan sarana komunikasi dan informasi, akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan kebutuhan hidupnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat

No	Prasarana	Jumlah
1.	TK/PAUD	444 Unit
2.	Sekolah SD	591 Unit
3.	SekolahMI	105 Unit
4.	Sekolah SMP	92 Unit
5.	Sekolah MTS	86 Unit
6.	Sekolah SMA	27 Unit
7.	Sekolah SMK	43 Unit
9.	Sekolah MA	64 Unit
10.	Rumah Sakit	5 Unit
11.	Rumah Sakit Bersalin	0 Unit
12.	PT	9 Unit
13.	Poliklinik	25 Unit
14.	Puskesmas	34 Unit
15.	Masjid	995 Unit

16.	Mushola	5.705 Unit
17.	Gereja	50 Unit
18.	Pura	17 Unit
19.	Vihara	0 Unit

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2019 (data diolah)

2. Kondisi Masyarakat Kabupaten Ponorogo

a) Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi di suatu daerah mempunyai perananan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Dalam mengembangkan ekonomi di suatu daerah, pengumpulan dan penghitungan data Produk Domestik semakin penting dan dirasakan manfaat utamanya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Untuk melihat kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo, dapat dilihat dengan menggunakan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) setiap tahunnya yang mengalami kenaikan, baik dilihat dari nilai dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Ponorogo ADHB tahun 2018 adalah 19.257.493 sedangkan ADHK adalah 13.619.572. Berikut tabel perkembangan peningkatan PDRB Kabupataen Ponorogo sebagai berikut:

Tabel 4.5 Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai PDRB	
	ADH Berlaku (Juta Rupiah)	ADH Konstan (Juta Rupiah)
2014	13.394.066	11.104.536
2015	14.916.034	11.687.865
2016	16.419.185	12.305.652
2017	17.760.420	12.933.449

2018	19.257.493	13.619.572
------	------------	------------

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2019 (data diolah)

Ditinjau dari nilai PDRB Kabupaten Ponorogo, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 per sektor kegiatan usaha, peranan sektor pertanian masih sangat dominan walaupun ada tahun 2018 (28,04%) mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Setelah sektor pertanian yang memiliki peran cukup besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo pada umumnya memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, dimana sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak serta sektor usaha-usaha lainnya. Pada kegiatan dan corak mata pencaharian yang didukung dengan kondisi alamnya, membentuk karakter dan kebiasaan tingkah laku masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian Kabupaten Ponorogo, berikut tabel kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Ponorogo:

Tabel 4.6 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo (Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan	31,60	31,65	30,84	29,03	28,04
Pertambangan dan penggalian	2,39	2,30	2,22	2,24	2,26
Industri Pengolahan	6,79	6,74	6,73	7,00	7,15
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kontruksi					
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,91	16,18	16,63	17,30	17,84
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,80	2,89	3,01	3,16	3,22
Informasi dan Komunikasi	6,87	6,83	6,86	6,95	6,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,20	3,24	3,26	3,26
Real Estate	2,34	2,44	2,42	2,44	2,53
Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44	0,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	5,23	5,29	5,25	5,36
Jasa Pendidikan	8,46	8,45	8,40	8,52	8,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,76	0,75	0,77	0,78
Jasa Lainnya	1,94	1,97	1,92	1,94	1,96

Sumber: Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2019 (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha yang sangat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Ponorogo yaitu sektor pertanian yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, meskipun demikian walaupun sektor pertanian, perhutanan dan perikanan mengalami penurunan akan tetapi masih berada di urutan tertinggi, artinya bahwa masyarakat di Ponorogo mayoritas memiliki aktivitas perekonomian dibidang pertanian, perhutanan dan perikanan. Kemudian setelah sektor pertanian, perhutanan dan perikanan yang memiliki peran cuku besar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran.

b) Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo umumnya merupakan suku yang homogen dimana sebagian besar adalah berasal dari suku

Jawa. Kabupaten Ponorogo memiliki ciri khas budaya yaitu kesenian reog sebagai salah satu aspek yang dapat memperkuat identitas daerah. Perkembangan nilai-nilai budaya yang bersifat religius mewarnai kehidupan masyarakat sebagai kekayaan budaya yang perlu mendapatkan tempat tersendiri sehingga menanamkan nilai moral yang mendukung pemerintah daerah.

Kesenian reog dapat menjadi salah satu andalan utama penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pembangunan, dimana kesenian reog yang merupakan budaya asli dari Ponorogo ini memiliki makna perjuangan dan diaktualisasikan dalam pembangunan modern wilayah perencanaan pada umumnya dan kabupaten pada umumnya. Penguatan pada kesenian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perkembangan wilayah perencanaan pada perkembangannya.

c) **Kondisi Sosial Keagamaan**

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas memeluk agama Islam sebesar 99,37 persen, diikuti Kristen Protestan sebesar 0,31 persen, sebesar Katholik 0,28 persen, Budha sebesar 0,03 persen dan agama Hindu sebesar 0,01 persen.⁵⁹

3. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Data tersebut diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.⁶⁰ Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasiselanjutnya dapat keluar

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019*, (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), 83.

⁶⁰ Dokumentasi Pengetahuan dan Kebijakan Pelaksanaan PKH 2018

dari rantai kemiskinan.⁶¹ Melalui PKH, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer yang berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Ponorogo berlangsung sejak tahun 2007. Sebelum adanya PKH ini, kemiskinan di Ponorogo mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun sudah ada bantuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan akan tetapi masyarakat miskin masih saja ada dan cenderung meningkat. Oleh sebab itu pemerintah membuat suatu program, dimana program tersebut bertujuan untuk menunjang keluarga miskin agar bisa mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di negara ini. Melalui PKH pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia diatas 70 tahun dan bagi penyandang disabilitas berat.

Setiap tahunnya penerima PKH selalu peningkatan. Nama-nama penerima PKH ditentukan oleh pemerintah pusat, kemudian disampaikan oleh (KORKAB) kordinator kabupaten Ponogo. Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ponorogo berjumlah 42.003 anggota. Berikut adalah data jumlah penerima KPM PKH di setiap kecamatan Kabupaten Ponorogo:⁶²

Tabel 4.7 Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah KPM
Babadan	714
Badegan	2.237

⁶¹ PKH (Program Keluarga Harapan), dalam <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, (diakses pada tanggal 9 April 2020, jam 21.47).

⁶² Dokumentasi Data KPM PKH Kabupaten Ponorogo 2020

Balong	2.045
Bungkal	1.509
Jambon	3.209
Jenangan	1.205
Jetis	1.261
Kauman	2.073
Mlarak	1.556
Ngebel	1.482
Ngrayun	7.019
Ponorogo	982
Pudak	726
Pulung	2.205
Sambit	1.689
Sampung	1.284
Sawoo	3.874
Siman	853
Slahung	2.978
Sooko	1.307
Sukorejo	1.795
Total	42.003

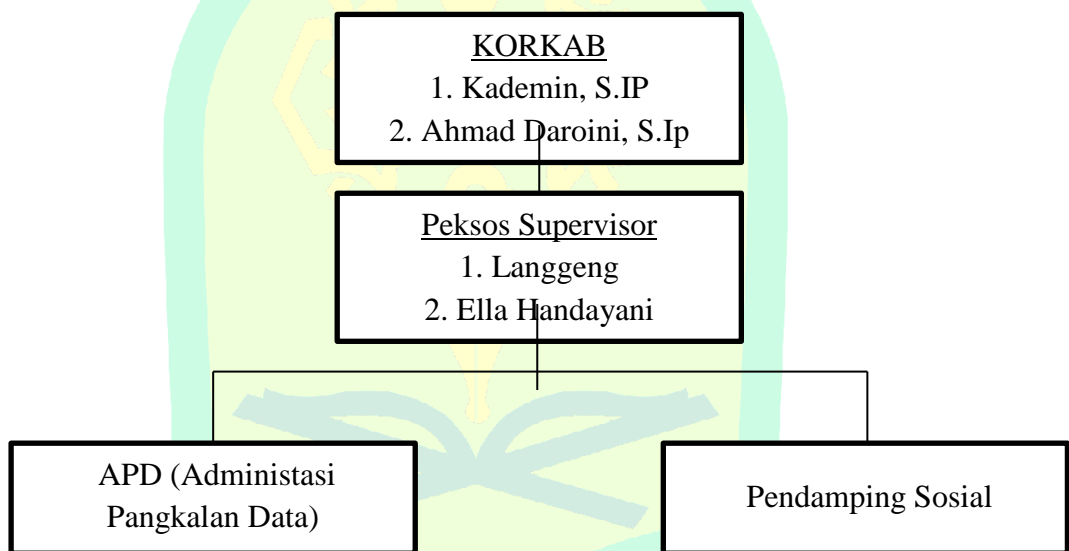
Sumber : data KPM PKH Kabupaten Ponorogo 2020 (data diolah)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penerima bantuan PKH di Kabupaten Ponorogo terbanyak yaitu ada pada Kecamatan Ngrayun sebanyak 7.019, kemudian diikuti oleh kecamatan Sawoo sebesar 3.874 dan Kecamatan Jambon sebesar 3.209. Kemudian untuk daerah yang mendapat bantuan PKH paling sedikit berada pada kecamatan Badadan sebanyak 714 dan Pudak 726. Dari sekian banyak jumlah peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dibutuhkan adanya pendamping PKH. Melalui pendamping PKH, peserta PKH diberikan arahan teknis dan informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari pendataan peserta

PKH, sosialisasi mengenai pertemuan rutin bulanan, sampai penyaluran penerimaan besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo memiliki struktur organisasi, dimana setiap Kabupaten/Kota dipegang atau diketuai oleh Koordinator Kabupaten (KORKAB) atau Kabupaten Kota (KORKAB). Berikut bagan struktur Kepengurusan Program Keluarga Harapan Kabupaten Ponorogo :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kabupaten Ponorogo⁶³



Berdasarkan struktur PKH kepengurusan Program Keluarga Harapan (PKH) diatas, setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tugas yang dijalankan oleh kepengurusan PKH sebagai berikut:

- a. Koordinator Kabupaten (KORKAB) bertugas :
 - 1) Untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten terkait implementasi PKH dan sinkronisasi dengan program bantuan komplementer lain.
 - 2) Mengkoordinasikan, mengelola data dan melaporkan implementasi: pertemuan awal dan validasi KPM, verifikasi dan komitmen KPM untuk berpartisipasi di dalam PKH, pemutakhiran data KPM untuk

⁶³ Ella Handayani, *Wawawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2020.

PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, dan pengelolaan dokumen dan data terkait PKH.

- 3) Bersama dengan pekerja sosial supervisor mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan (P2K2)
- 4) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PKH di seluruh kecamatan.
- 5) Mengkoordinasikan proses mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH di seluruh kecamatan untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan komplementer lainnya.

b. Pekerja Sosial (Peksos) Supervisor bertugas untuk:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Koordinator Kabupaten dan pemangku kepentingan lain terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
- 2) Melakukan identifikasi kebutuhan, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pendamping sosial PKH terkait P2K2
- 3) Melakukan modifikasi materi P2K2 sesuai dengan kondisi dan situasi di lokasi tugas
- 4) Melakukan pengelolaan kasus (*case Management*), memberikan dukungan dan umpan balik teknis dan non-teknis kepada pendamping sosial PKH pada pelaksanaan P2K2
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pelaksanaan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH.

c. Administrasi Pangkalan Data (APD) bertugas untuk :

- 1) Menerima data dan formulir terkait validasi calon KPM PKH, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM PKH serta mendistribusikannya kepada seluruh pendamping sosial.
- 2) Menerima, memverifikasi dan mengelola data hasil validasi, verifikasi komitmen, pemutakhiran data dan realisasi penyaluran

bantuan dari seluruh bantuan pendamping sosial dalam aplikasi SIM PKH.

- 3) Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi pemangku kepentingan di kabupaten.
 - 4) Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan PKH di wilayah kerjanya kepada koordinator kabupaten dan dinas sosial kabupaten kota.
- d. Pendamping Sosial PKH yang berjumlah 131 dan terbagi dalam 21 kecamatan, pendamping sosial PKH bertugas untuk:
- 1) Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dilingkungannya.
 - 2) Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, dan calon KPM PKH.
 - 3) Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis.
 - 4) Memastikan peserta PKH memperoleh bantuan komplementer.
 - 5) Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada koordinator Kabupaten secara berkala.⁶⁴

Penyaluran PKH bagi kelompok miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Bantuan ini tidak diberikan secara cuma-cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima bantuan harus memenuhi komponen penerima bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, komponen penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Komponen Kesehatan yaitu untuk ibu hamil/nifas dan anak usia di bawah 6 tahun. Untuk komponen ibu hamil yang mendapat bantuan PKH yaitu hanya untuk hamil pertama dan kedua.
- b. Komponen pendidikan yaitu untuk keluarga yang memiliki anak yang sedang bersekolah tingkat SD, SMP sederajat dan SMA/ sederajat.

⁶⁴ Ella Handayani, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2020.

⁶⁵ Dokumentasi, di Kantor PKH Kabupaten Ponorogo 2020

- c. Komponen kesejahteraan sosial yaitu untuk disabilitas berat dan lanjut usia mulai dari 60 tahun.

Adanya komponen dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk dari besaran indeks bantuan yang ditujukan kepada peserta penerima PKH. Berikut tabel indeks bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

Tabel 4.8 Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jenis Komponen		Jumlah Indeks Bantuan
Komponen Kesehatan	1. Ibu Hamil	Rp. 2.400.000
	2. Anak Usia Dini	Rp. 2.400.000
Komponen Pendidikan	1. SD	Rp. 900.000
	2. SMP	Rp. 1.500.000
	3. SMA	Rp. 2.000.000
Komponen Kesejahteraan Sosial	1. Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
	2. Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber : Buku Panduan PKH⁶⁶

Berdasarkan tabel diatas, jumlah indeks bantuan yang diberikan kepada penerima PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali, jumlah tersebut tidak langsung diberikan sekaligus, melainkan diberikan secara berkala dalam jangka waktu tiga bulan tersebut. Misalnya, dalam satu keluarga mendapat bantuan PKH dan masuk kedalam komponen pendidikan, karena didalamnya terdapat anak yang sedang bersekolah SD. Indeks bantuan yang didapat setiap tahunnya yaitu Rp. 900.000. dari jumlah indeks bantuan tersebut diberikan dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Sehingga dalam waktu tiga bulan tersebut jumlah uang yang didapat yaitu Rp. 300.000. bantuan uang tersebut tentunya digunakan untuk kebutuhan sekolahnya, begitupun juga dengan keluarga penerima PKH yang menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan komponen yang

⁶⁶ Ibu Lina, Wawancara, 16 Maret 2020

diberikan. Namun, dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) membuat penerima anggota PKH tidak menggunakan uang bantuan PKH untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. Sehingga dalam pengelolaan uang yang digunakan pada keluarga PKH tidak efektif. Oleh sebab itu, keefektifan pengelolaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo ini perlu dilakukan penelitian, apakah dengan adanya PKH di Kabupaten Ponorogo ini bagi keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu kemudian mendapat bantuan PKH ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan perekonomian keluarganya adakah perubahan menjadi lebih baik atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap anggota Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah Ponorogo. Dalam penelitian ini penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada anggota PKH, dua orang pendamping PKH, satu supervisor dan satu koordinator daerah. Berikut paparan data informasi narasumber yang diwawancarai, yaitu:

Tabel 4.9 Data Informan Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Ahmad Daroini, S.Ip	Korkab PKH Ponorogo
2.	Ella Handayani	Peksos Supervisor
3.	Nur Cholis	Pendamping PKH
4.	Lina	Pendamping PKH
5.	Ibu Rokhana	Penerima PKH
6.	Ibu Dwi Handayani	Penerima PKH
7.	Ibu Tumini	Penerima PKH
8.	Ibu Surati	Penerima PKH
9.	Ibu Sringatin	Penerima PKH
10.	Ibu Susi	Penerima PKH

Menurut Koordinator Daerah PKH, bahwa Kabupaten Ponorogo menerima bantuan PKH sejak tahun 2007. Fakta yang ditemukan bahwa

terdapat masalah dalam pengelolaan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada umumnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Ada 3 ukuran efektifitas yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

4. Efektivitas Pencapaian Tujuan Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-baigiannya maupun penatahapan dalam arti periodisasinya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan didalam setiap programnya. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut.

Untuk melihat bagaimana pengelolaan penerimaan bantuan pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan ukuran pencapaian tujuan yang merupakan bagian dari proses adanya suatu target atau sasaran untuk mencapai tujuan. Target dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan penerima PKH yang tepat sasaran yaitu untuk keluarga yang masuk kedalam kategori keluarga miskin ataupun keluarga tidak mampu dan pengelolaan indeks bantuan digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan komponen yang diterima. Ditemukan persepsi yang berbeda dalam pencapaian tujuan dalam efektivitas pengeloalaan PKH di Kabupaten Ponorogo ini.

Target dalam PKH dari aspek ketepatan sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH ibu lina, beliau mengantakan bahwa:

“Setiap tahun harus ada 10 orang yang digraduasi, kepada penerima PKH siap gak siap, diwajibkan untuk mengraduasikan diri dari

PKH yang artinya bahwa jika keluarga tersebut sudah memiliki perekonomian yang cukup baik, dilihat dari penghasilan, dan segi fasilitas dirumahnya sudah baik maka keluarga tersebut harus mundur dari PKH. Karena ada mbak, salah satu penerima PKH yang sudah mapan dari segi kehidupan perekonomiannya sudah baik, istrinya juga bekerja diluar negeri, dan punya sapi dirumahnya, rumahnya juga sudah bagus, tetapi bapak itu tidak mau graduasi dari PKH. Jadi menurut saya dikarenakan penerima PKH ini kan sudah dari keputusan pemerintah pusat jadi ya, mengenai hal penerima tepat sasaran atau tidaknya menurut saya kurang tepat karena masih ada keluarga yang masuk kedalam kategori miskin tetapi belum menjadi peserta KPM PKH.”⁶⁷

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu Surati, yang mengatakan bahwa:

“Kalo mengenai tepat sasaran atau tidaknya, menurut saya penerimaan PKH ini kurang tepat sasaran mbak, karena nama-nama penerima PKH sudah dari keputusan Dinas Sosial Langsung, jadi saya berusaha mengusulkan kepada pendamping PKH, bahwa ada salah satu warga kita yang memang dilihat secara langsung sudah terlihat bahwa dia memang keluarga tidak mampu dan memiliki anak sekolah, saya pun sudah bertanya kepada pendamping PKH secara langsung, kenapa kok di keluarga itu tidak mendapat bantaun PKH, dan pendamping PKH nya pun juga sudah berusaha biar keluarga itu mendapat bantuan PKH. Tetapi usulan itu sampai sekarang belum ada responnya. Kadang ada tetangga yang sudah bekerja diluar negeri malah dapat bantuan PKH, sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan anak untuk sekolah malah tidak dapat bantuan PKH. Jadi ya menurut saya kalo dibilang tepat sasaran masih kurang mbak.”⁶⁸

Sedangkan target yang ingin dicapai oleh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam aspek pengelolaan indeks bantuan digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan komponen yang diterima.

⁶⁷ Ibu Lina, *Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2020

⁶⁸ Ibu Surati, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sringatin salah satu peserta PKH, menyatakan bahwa:

“Saya seorang ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai tukang bangunan. Saya mendapat bantuan PKH dari tahun 2018, dan besaran bantuan yang didapatkan setiap tiga bulannya itu uang dan barang kebutuhan pokok. Untuk uang setiap tiga bulannya saya dapat Rp. 600.000, dan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras 10 Kg, telur 1 Kg, dan kacang tanah. Saya mendapat bantuan uang 600 ribu karna di keluarga saya terdapat komponen pendidikan, anak saya dua duanya masih sekolah di SD jadi untuk satu anak itu mendapat jatah 300 ribu. Biasanya uang yang didapat dari PKH itu saya gunakan untuk keperluan sekolah anak seperti membayar bulanan sekolah anak, membeli seragam, buku. Tapi kadang juga buat beli keperluan diluar sekolah seperti buat beli pulsa, perlengkapan sabun, juga membeli baju untuk anak-anak. Saya sangat bersyukur mendapat bantuan PKH karena bisa memenuhi segala kebutuhan sehari-hari keluarga saya, meskipun terkadang saya menggunakan uang bantuan PKH untuk membeli keperluan diluar komponen, seperti membeli keperluan untuk memasak, dan juga membeli pulsa mbak. Tapi yang saya utamakan untuk anak sekolah dulu”⁶⁹

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu Tumini salah satu penerima PKH, menyatakan bahwa:

“Saya seorang ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai sopir truk, dan anggota dalam satu keluarga itu ada 5. Untuk penghasilan suami saya dalam sebulan satu juta. Keluarga saya mendapat bantuan PKH sejak tahun 2016, dan saya mendapat bantuan PKH itu berupa barang seperti beras 10Kg, telur 1 Kg, dan kacang. Bantuan berupa uang juga ada, saya mendapat bantuan berupa uang dalam tiga bulannya itu 800 ribu dari bantuan uang itu biasanya saya gunakan untuk keperluan sekolah anak, beli susu anak dan keperluan rumah tangga, kadang juga buat beli pulsa internet dan jajan anak saya. Saya merasa pantas dalam menerima PKH karan

⁶⁹ Ibu Sringatin, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2020

merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan jika hanya mengandalkan penghasilan. Dan menurut saya PKH itu sudah tepat sasaran karena yang menjadi anggota PKH dikelompok saya itu termasuk dalam kategori keluarga yang kurang mampu.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi salah satu penerima PKH, menyatakan bahwa:

“Saya mendapat bantuan PKH dari tahun 2018, memiliki 4 orang anak dan suami saya bekerja serabutan. Sedangkan penghasilan suami saya setiap bulannya tidak menentu, paling banyak yang didapat kira-kira Rp.1.000.000 mbak. saya menerima bantuan uang dari PKH dalam tiga bulan sekali yaitu Rp1.800.000, dan bantuan barang kebutuhan pokok seperti beras 10 Kg, telur 1 Kg, dan kacang. Biasanya uang bantuan PKH itu saya pakai untuk keperluan solah anak-anak, membeli susu, kadang buat beli baju harian anak-anak, beli pulsa internet, keperluan dapur tetapi yang paling utama untuk keperluan sekolah anak-anak. Saya merasa pantas menerima bantuan PKH karena keluarga saya memang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami itu masih kurang. Sebelum saya mendapat bantuan PKH ini keluarga saya sering sekali mengalami kesulitan dalam perkenomian. Dan saya juga selalu rajin dalam mengikuti pertemuan setiap bulannya, pertemuan tersebut biasanya diisi dengan absen penerima PKH karena kalo tidak absen, uang bantuan PKH untuk bulan berikutnya tidak cair. Lalu dari pendamping PKH memberikan sosialisasi mengenai kesehatan, cara mengelola keuangan keluarga dan bahkan pendamping memberikan pelatihan ketrampilan.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa target sasaran pada penerima PKH kurang tepat sasaran, serta pengelolaan dalam penggunaan uang dari bantuan PKH masih belum maksimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan komplementernya.

⁷⁰ Ibu Tumini, *Wawancara*, Ponorogo, 19 Maret 2020

⁷¹ Ibu Dwi, *Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2020.

5. Efektivitas Integrasi Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga merupakan salah satu kegiatan sosialisasi PKH. Integrasi dalam Program Keluarga Harapan ini adalah mengenai sosialisasi dan pengembangan ketrampilan yang diberikan oleh pendamping PKH. Dalam bidang sosialisasi, pendamping PKH memberikan materi tentang keluarga, mengatur keuangan rumah tangga, dan tentang kesehatan. Adanya P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban oleh peserta PKH tidak semata pemenuhan kewajiban sebagai penerima PKH, namun juga karena adanya kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak dalam keluarga peserta PKH. P2K2 memiliki modul utama yaitu modul kesehatan dan gizi, modul pendidikan dan pengasuhan anak, modul keuangan keluarga, modul perlindungan anak, dan modul kesejahteraan sosial. Dari modul tersebut pendamping PKH ikut serta bertanggung jawab dalam penyampaian disetiap modul.

Untuk melihat bagaimana integrasi dalam efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, pak Cholis sebagai berikut:

“Setiap bulan memang dari saya selaku pendamping PKH harus mengadakan pertemuan rutin bulanan. Dan dikelompok saya pertemuan rutin bulanan dilaksanakan setiap tanggal 15. Karena sekarang kan sudah ada modul PKH ya mbak, jadi pertemuan rutin bulan itu biasanya diisi dengan sosialisasi dan juga pengembangan keterampilan dimana materi atau tema yang akan saya sampaikan sesuai dengan panduan dari modul P2K2 itu mbak. Sosialisasi biasanya saya mengundang orang untuk memberikan

informasi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, seperti kemarin saya mengundang teman saya yang kebetulan beliau seorang bidan. Yasudah saya meminta tolong kepada teman saya untuk memebrikan informasi kepada anggota penerima PKH mengenai kesehatan. Jadi isi dari pertemuan rutin bulanan itu kadang saya isi dengan sosialisasi, kadang juga pengembangan ketrampilan. Nah mengenai pengembangan keterampilan itu, kita membuat kerajinan tangan tujuannya agar dari pembuatan kerajinan tangan atau hasil karya yang ibuat bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk ibbu-ibu PKH.”⁷²

Dari pernyataan penampung PKH tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Susi, yang mengatakan bahwa:

“Selama saya mendapatkan bantuan PKH, setiap pertemuan bulanan saya selalu hadir, kalau saya tidak hadir nanti uang PKH tidak keluar di bulan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada saat pertemuan rutin bulanan itu selain absen ya mbak, terus juga karena dari pendamping dikasih buku modul tentang pendidikan, kesehatan, tentang keuangan keluarga gitu kadang dari pendamping PKH diisi dengan sosialisasi tentang cara mengasuh anak yang baik dan benar, cara mengelola keuangan di keluarga. Tetapi kalau keterampilan, dari pendamping belum pernah menyampaikan Jadi dari pertemuan bulanan itu kita selalu mendapat masukan hanya sosialisasi dari pendamping gitu mbak”⁷³

Sama halnya dikatakan oleh ibu Surati bahwa dalam hal penyampaian materi PKH yaitu sosialisasi selalu rutin dilakukan, akan tetapi dalam hal pengembangan keterampilan belum ada. Ibu Surati mengatakan:

“Setiap bulan selalu diadakan pertemuan rutin dengan pendamping PKH. Kegiatan yang dilakukakn itu biasanya wajib absen dulu, setelah itu pendamping menyampaikan sosialisasi tentang materi PKH sesuai dengan

⁷² Pak Cholis, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2020.

⁷³ Ibu Susi, *Wawancara*, Ponorogo, 19 Maret 2020.

modul P2K2, tetapi membuat keterampilan atau kerajinan tangan gitu dari pendamping belum pernah disampaikan, jadi hanya sosialisasi saja mbak”⁷⁴

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa integrasi terhadap efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan dilihat dari porses sosialisasi yang merupakan tujuan dari P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, dimana setiap bulannya selalu diadakan pertemuan bulanan dan peserta PKH berkewajiban untuk mengikuti pertemuan rutin bulanan tersebut. Begitu juga dengan pendamping PKH yang setiap bulannya menyampaikan materi P2K2 dalam bentuk sosialisasi dan belum terlaksananya pengembangan ketrampilan dengan peserta PKH.

6. Efektivitas Adaptasi Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja atau Sumber daya Manusia (SDM) yang tersedia, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah pengisian SDM yang ada, sebelum menjadi Pendamping PKH sudah mengikuti masa pelatihan atau training serta mendapat arahan dari koordinator daerah selaku pelaksanan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Peran aktif dari pendamping PKH merupakan adaptasi PKH agar tujuan dari PKH dapat tercapai secara maksimal.

Untuk melihat bagaimana bentuk adaptasi pada efektivitas pengeloan PKH di Kabupaten Ponorogo dengan melihat persepsi dari penerima atau anggota PKH dan juga pendamping PKH. Berdasarkan hasil wawancara dari penerima PKH dengan ibu Rokhana, mengatakan bahwa:

“Setiap bulan dari pendamping PKH selalu mengingatkan untuk mengadakan pertemuan setiap bulannya mbak, pertemuan setiap bulannya kalo di kelompok saya setiap tanggal 15 dan pendamping PKH pasti diusahakan hadir dalam pertemuan rutin setiap bulannya itu. Menurut saya, pendamping selalu berperan aktif dalam mengurus anggota PKH mulai dari

⁷⁴ Ibu Surati, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2020.

pendataan awal, sampai penyaluran bantuan kepada penerima PKH kita selalu diarahkan dan diajarkan dari pendamping langsung”⁷⁵

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Tumini, bahwa pendamping selalu berperan aktif dalam kegiatan PKH. Ibu Tumini mengatakan bahwa:

“Kalo dari pendamping PKH di kelompok saya mbak, beliau selalu berperan aktif dalam kegiatan PKH. Mislanya ketika pertemuan rutin setiap bulannya, pendamping PKH selalu hadir untuk mengisi materi tentang PKH. Dan pendamping PKH juga selalu menyampaikan informasi terbaru tentang pengumuman PKH dari Dinas Sosial misalnya ya mbak, nah informasi seperti itu dari pendamping PKH selalu disampaikan ke anggota PKH, dari pendamping PKH juga selalu mengingatkan dan menghimbau untuk wajib hadir pada pertemuan rutin setiap bulannya mbak.”⁷⁶

Hal tersebut diperkuat dengan ibu Lina, selaku Pendamping PKH, mengatakan bahwa:

“Saya selaku pendamping PKH selalu hadir dalam pertemuan rutin bulanan, karena memang saya ditugaskan menjadi pendamping PKH ya untuk mendampingi mereka. Dan saya juga aktif juga dalam kegiatan PKH bersama dengan anggota PKH saya berusaha untuk aktif dan selalu mengikuti kegiatan PKH mulai dari pertemuan awal dengan anggota, membantu memverifikasi data antara pihak bank dengan anggota yang bersangkutan, sampai penyaluran uang bantuan dari bank dengan anggota langsung, karena sebagian besar anggota belum begitu paham mengenai sistem pencairan uang dan masalah teknologi saat ini. Dan saya juga mendampingi anggota PKH untuk menyampaikan materi PKH pada pertemuan rutin setiap bulannya mbak.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses adaptasi dari pendamping PKH selalu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mendampingi anggota PKH, dari hal tersebut terbangun kerjasama antara pihak keluarga karena adanya proses interaksi yang baik antara pihak

⁷⁵ Ibu Rokhana, *Wawancara*, Ponorogo, 7 April 2020

⁷⁶ Ibu Tumini, *Wawancara*, Ponorogo, 19 Maret 2020

⁷⁷ Ibu Lina, *Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2020.

pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan PKH.

B. ANALISIS DATA

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sosial demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk menaggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan manterial, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya”.

Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada tiga komponen diantaranya yaitu komponen pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak dari SD,SMP, SMA bagi keluarga tidak mampu), komponen kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hami, ibu nifas, dan anak balita), dan komponen kesejahteraan sosial (meningkatkan kesejahteraan untuk disabilitas berat dan lanjut usia diatas 70 tahun). Dengan adanya PKH diharapkan penerima PKH bisa memfokuskan pada pengelolaan bantuan berdasarkan komplementer yang diterima. Untuk melihat tercapainya PKH disuatu daerah harus memenuhi indikator efektivitas pengelolaan PKH, berikut ini peneliti akan menguraikan hasil temuan lapangan efektivitas pengelolaan PKH berdasarkan pengukuran pada tiga indikator efektivitas, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas Pencapaian Tujuan Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Efektivitas merupakan unsur pokok

untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan didalam setiap programnya. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa target sasaran pada penerima PKH masih kurang tepat sasaran, serta pengelolaan dalam penggunaan indeks bantuan PKH masih belum maksimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan komplementernya.

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran. Dan dari proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Sehingga jika diukur dari pencapaian tujuan yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum efektif. Seharusnya agar Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan efektif, jika dalam target dan proses tercapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut adanya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ponorogo akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Efektivitas Integrasi dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialiasi. Dan dari integrasi berkaitan dengan perkembangan yang merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Dalam organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu di dalam integrasi akan membawa proses perkembangan suatu individu ataupun organisasi yang akan memberikan efek didalam keberlangsungan hidupnya ataupun didalam organisasi tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa integrasi terhadap efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan dilihat dari proses sosialisasi yang merupakan tujuan dari P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, dimana setiap bulannya selalu diadakan pertemuan bulanan dan peserta PKH berkewajiban untuk mengikuti pertemuan rutin bulanan tersebut. Begitu juga dengan pendamping PKH yang setiap bulannya menyampaikan materi P2K2 dalam bentuk sosialisasi dan belum terlaksananya pengembangan ketrampilan dengan peserta PKH.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa proses sosialisasi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum berjalan efektif, karena didalam bagian proses sosialisasi terdapat pengembangan keterampilan yang masih belum terlaksanakan dalam kegiatan PKH. Sehingga jika dilihat dari integrasi dalam mengukur efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum efektif. Agar pengelolaan indeks bantuan PKH dikatakan efektif, dapat menggunakan ukuran integrasi. Dari ukuran integrasi tersebut yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan anggota PKH karena akan memberikan efek didalam keberlangsungan hidupnya baik didalam lingkungan keluarga, PKH, dan masyarakat.

3. Analisis Efektivitas Adaptasi dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kemampuan adaptasi dalam sebuah organisasi merupakan sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan baik dari sisi Intern dan ekstern yang ada, kemudian dari adanya perubahan tersebut akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses adaptasi dari pendamping PKH selalu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mendampingi anggota PKH, dari hal tersebut terbangun kerjasama antara

pihak keluarga karena adanya proses interaksi yang baik antara pihak pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan PKH.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa proses adaptasi dalam efektivitas pengelolaan PKH sudah berjalan efektif, karena dalam proses adaptasi tersebut, setiap pendamping sudah memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman mengenai Program Keluarga Harapan serta pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting terhadap kegiatan PKH. Sehingga dengan kemampuan adaptasi, pendamping bisa menyesuaikan diri dengan anggota PKH dan lingkungannya.

4. Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai seorang muslim, sebaiknya segala macam aspek kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Tidak terkecuali dalam aktivitas perekonomian, termasuk cara mengatur keuangan. Islam telah menetapkan ajaran-ajaran bagaimana cara seseorang mengatur persoalan finansialnya dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan tujuan agar umat muslim tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan finansialnya yang merugikan dan membuat hidup sejahtera. Menurut manajemen Islam, dengan menggunakan prinsip untuk mengatur hidupnya agar efektif adalah sebagai berikut:

e. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan maksudnya dalam menjalankan suatu kegiatan seorang muslim harus berbuat baik, bertindak yang harmonis, pantas dan wajar dan tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir dan pelit.

Dalam efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo dilihat dari proses penerimaan dana bantuan pada anggota PKH sudah sesuai dengan besaran bantuan yang sudah ditentukan berdasarkan komplementer yang diterimanya. Hal ini dibuktikan dengan para penerima anggota PKH yang menerima dana bantuan setiap tiga bulan sekali dengan besaran bantuan jumlah sesuai dengan komplementer yang

diterimanya. Jadi efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan.

f. Prinsip mencapai kemanfaatan

Prinsip mencapai kemanfaatan maksudnya seorang muslim dalam menjalankan kegiatannya harus bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi lingkungan dan agamanya.

Adanya kegiatan pertemuan rutin setiap bulan anggota PKH dapat merasakan manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut. Manfaat yang dirasakan anggota PKH dari kegiatan PKH yaitu adanya sosialisasi dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan contoh yang baik untuk dipraktikkan didalam kegiatan dirumah. Jadi efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan.

g. Prinsip tidak boros

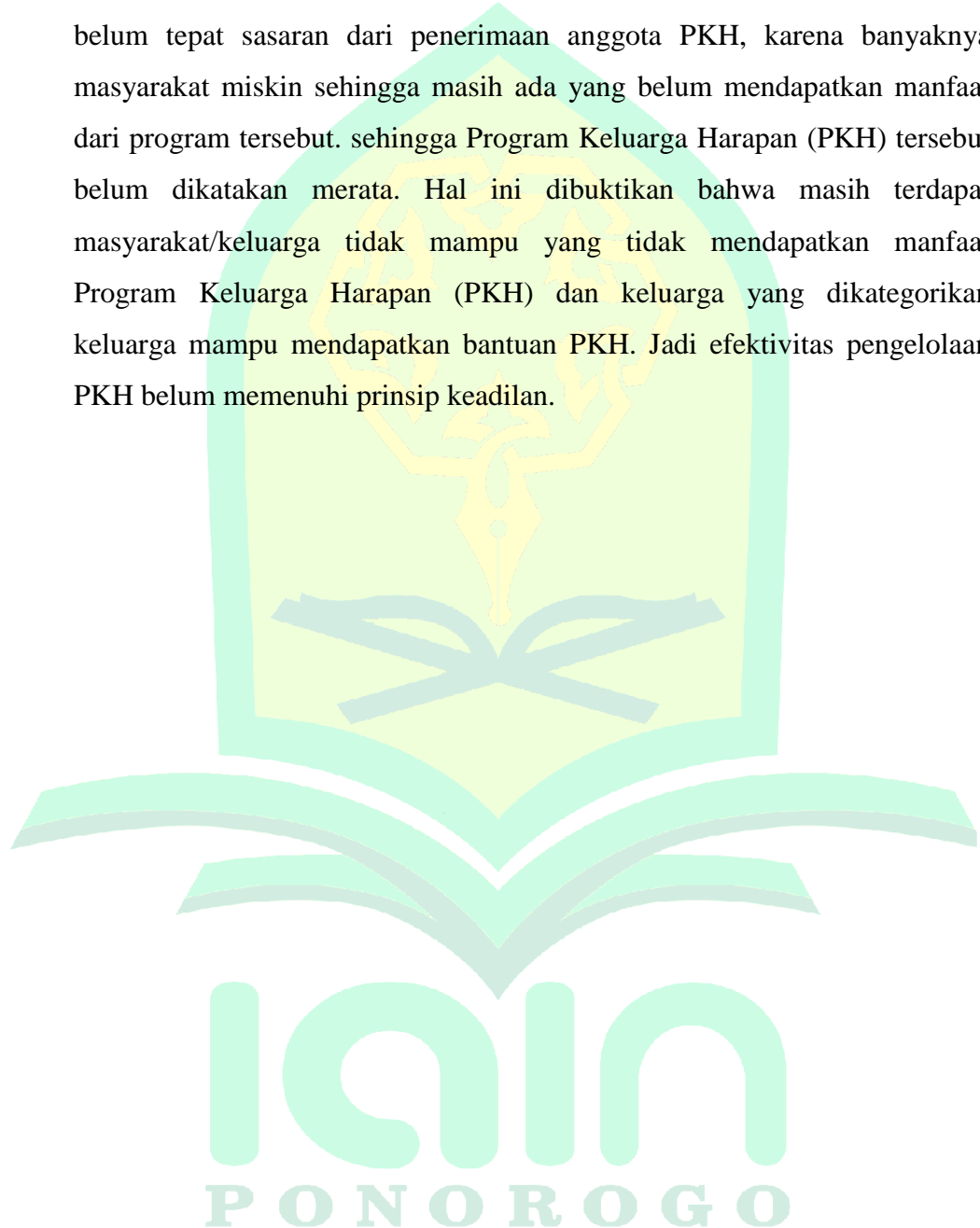
Prinsip tidak boros yang dimaksud disini adalah setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya dalam menggunakan harta, waktu, dan tenaga tidak digunakan secara boros. Jika dilihat dari sudut ekonomi sifat boros termasuk biaya sehingga dalam penggunaan biaya menjadi beban dalam manajemen.

Dalam efektivitas penegelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ponorogo dilihat dari pengelolaan dana bantuan yang diterima oleh anggota PKH masih belum efektif, karena anggota PKH selain menggunakan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan komponen, anggota PKH menggunakan dana tersebut untuk membeli barang diluar kebutuhan komponen. Seharusnya anggota PKH menggunakan dana bantuan PKH sesuai dengan bantuan komponen agar menghindari adanya sikap boros. Jadi efektivitas dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo masih belum memenuhi prinsip tidak boros.

h. Prinsip berlaku adil

Prinsip berlaku adil artinya seorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien haruslah berlaku adil terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan adil dalam semua perbuatannya.

Dalam efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum tepat sasaran dari penerimaan anggota PKH, karena banyaknya masyarakat miskin sehingga masih ada yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut. sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut belum dikatakan merata. Hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat/keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga yang dikategorikan keluarga mampu mendapatkan bantuan PKH. Jadi efektivitas pengelolaan PKH belum memenuhi prinsip keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pencapaian tujuan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Indikator pencapaian tujuan yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum efektif, karena untuk mengukur pencapaian tujuan dilihat dari aspek target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran. Dan aspek proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Seharusnya agar Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan efektif, jika dalam target dan proses tercapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Efektivitas integrasi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Indikator integrasi dalam mengukur efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum efektif, karena didalam bagian proses sosialisasi terdapat pengembangan keterampilan yang masih belum terlaksanakan dalam kegiatan PKH. Agar pengelolaan indeks bantuan PKH dikatakan efektif, dengan menggunakan ukuran integrasi. Dari ukuran integrasi tersebut yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan anggota PKH karena akan memberikan efek didalam keberlangsungan hidupnya baik didalam lingkungan keluarga, PKH, dan masyarakat.

3. Efektivitas adaptasi dalam pengelolaan Program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo

Indikator adaptasi dalam efektivitas pengelolaan PKH sudah berjalan efektif, karena dalam proses adaptasi tersebut, setiap

pendamping sudah memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman mengenai Program Keluarga Harapan serta pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting terhadap kegiatan PKH.

Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai. Pada efektivitas pengelolaan PKH dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya tujuan atau sasaran yang sudah dibuat. Apabila Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mencapai tujuan, maka PKH dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan ukuran efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH) masih dikatakan belum efektif karena ukuran pencapaian dan integrasi masih belum efektif dan hanya ukuran adaptasi saja yang sudah efektif atau berjalan dengan baik.

Pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo menurut perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dengan menggunakan prinsip-prinsip menurut manajemen Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keseimbangan
- b. Prinsip Kemanfaatan
- c. Prinsip Tidak Boros
- d. Prinsip Berlaku Adil

Berdasarkan data dilapangan Efektivitas Program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo dilihat dari 4 prinsip menurut manajemen Islam, keempat prinsip tersebut yang sudah terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kemanfaatan. Sedangkan Prinsip tidak boros belum terpenuhi karena penerima bantuan sosial Program Keluarga Sosial (PKH) tidak menggunakan dana bantuan yang didapat dari PKH, selain untuk membeli kebutuhan komponen, penerima PKH menggunakan dana tersebut untuk membeli barang diluar komponen. Dan Prinsip berlaku adil belum terpenuhi karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

B. SARAN

1. Bagi pihak Dinas Sosial, atau pimpinan PKH (Koordinator Kabupaten), sebaiknya dalam mengambil atau mengelola data perihal masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu diharapkan lebih tepat sasaran lagi dengan adanya pendataan kembali warga yang berhak mendapatkan Program keluarga Harapan (PKH), karena belum meratanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo.
2. Bagi Pendamping PKH, diharapkan agar lebih berperan aktif lagi dalam menyampaikan sosialisasi dalam hal keterampilan. Karena adanya bakat keterampilan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu.
3. Bagi penerima PKH, sebaiknya dalam mengelola dana bantuan yang diberikan PKH digunakan semaksimal mungkin untuk membeli kebutuhan sesuai komponennya. Karena dengan begitu penerima PKH tidak akan merasa kurang dengan bantuan yang diberikan. Dan
4. Penelitian selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di Implementasikan oleh pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Effendy, Mochtar. *Manajemen Suatu Pengantar Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 1986.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Pidarta, Made. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011.
- sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PPM Erlangga. 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Supardi. *Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2006.

Daftar Jurnal dan Skripsi

Akmel, Jheniar Evriliany. “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Inten Lampung. 2018.

Almizan. Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis(Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol.1. No.1. 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo. 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo. 2019.

Budiani, Ni Wayan. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol.2. No. 1.

Diana, Ridho. “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Inten Lampung. 2018.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 2015, *Kajian Program Keluarga Harapan*.

Hasimi, Diah Mukminatul. Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*. Vol.1. No.1. 2020.

Klimes, Lukas. Syahrani. Fajar Apriani, Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan

Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat. *e-journal Administrasi Negara*. Vol.7. No.1. 2019

Kusumawati, Eny. “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Prakoso, Sigit Budhi. Efektivitas Pelayanan Kesehatan BPJS di Kecamatan Batang. *Economics Development Analysis Journal*. Vol.4. No.1. 2015.

Prichatin, Asti Prichatin. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Purwana, Agung Eko. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica*. Vol. 11. No. 1. 2014.

Putri, Nora Eka. Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Tingkap*. Vol. 10. No.2. 2014.

Saputra, Khairul Anwar. “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota”. Skripsi. Sumatera : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. 2019

Suleman, Syahputra Adisanjaya dan Risna Resnawaty. Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, *Prosiding: Riset&PKM*. Vol. 4. No.1.

Zainollah dan Farid Wahyudi. Analisis Efektivitas Kebijakan Program Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ipteks*. Vol.3. No.2. 2018.

Daftar Website

Badan Pusat Statistik Ponorogo dalam ["https://ponorogokab.bps.go.id"](https://ponorogokab.bps.go.id) diakses pada tanggal 16 Februari 2020, jam 12.40.

Kominfo Ponorogo. "52 Keluarga Miskin Lulus Dari Status KPM PKH" Dalam <https://ponorogo.go.id/2019/05/16/52-keluarga-miskin-lulus-dari-status-kpm-pkh/> (diakses pada tanggal 8 Februari 2020, jam 20.59).

PKH dalam <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> .diakses pada tanggal 7 Februari 2020, jam 21.09.

Program Keluarga Harapan dalam <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> diakses pada tanggal 12 Februari 2020, jam 20.28.

Redaksi Teras Jatim. "Tingkat Kemiskinan di Ponorogo Menurun" Dalam <https://www.terasjatim.com/tingkat-kemiskinan-di-ponorogo-menurun/> diakses pada tanggal 8 Februari 2020, jam 18.05).

